

**ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU
TAHUN ANGGARAN 2011–2013**

Putri Kemala Dewi Lubis

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan

Nurlia Hafni

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstract

Implementation regional autonomy through fiscal decentralization scheme Labuhan Batu regency was not fully able to explore local revenue sources that the future will support the success of each region in implementing regional autonomy. Meanwhile, the data Of APBD that The absolute nature is not enough to provide adequate information on the financial performance of the region. The purpose of this research is measure the financial performance of Labuhan Batu regency measured by calculating the ratio of the independence, effectiveness ratio, efficiency ratio, the ratio of activity / harmony, growth rate and DSCR. The results of data analysis showed local financial independence Labuhan Batu regency Fiscal Year 2011-2013 in the category of low. Effectiveness of regional finance in the category very effective in the year 2011 - 2012 and are not effective in 2013. While the financial efficiency of the region are in the category of very efficient. When viewed from the ratio of activity / compatibility expenditures in the period 2011-2012, Labuhan Batu regency still prioritizing routine expenditure than capital expenditure. As well as the growth of local revenues tend to decline and negative in 2013, Labuhan Batu regency have a chance to do a loan because it has DSCR above 250% each year.

Keyword: financial performance, the ratio of the independence, effectiveness ratio, efficiency ratio, the ratio of harmony, growth ratio, the ratio DSCR

Abstrak

Implementasi otonomi daerah melalui skema desentralisasi fiskal Kabupaten Labuhan Batu tidak sepenuhnya mampu menggali sumber pendapatan daerah sehingga ke depan akan mendukung keberhasilan masing-masing daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Sementara itu, data APBD bahwa sifat absolut tidak cukup memberikan informasi yang memadai mengenai kinerja keuangan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja keuangan Kabupaten Labuhan Batu yang diukur dengan menghitung rasio independensi, rasio efektivitas, Rasio efisiensi, rasio aktivitas / harmoni, laju pertumbuhan dan DSCR. Hasil analisis data menunjukkan adanya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011-2013 dalam kategori rendah. Efektivitas keuangan daerah dalam kategori sangat efektif di tahun 2011 - 2012 dan tidak efektif di tahun 2013. Sedangkan efisiensi keuangan daerah berada pada kategori sangat efisien. Bila dilihat dari rasio belanja aktivitas / kecocokan pada periode 2011-2012, Kabupaten Labuhan Batu masih memprioritaskan

pengeluaran rutin dibanding belanja modal. Selain pertumbuhan pendapatan daerah cenderung menurun dan negatif di tahun 2013, Pemkab Labuhan Batu memiliki kesempatan untuk melakukan pinjaman karena memiliki DSCR di atas 250% setiap tahunnya.

Kata Kunci: Kinerja keuangan, rasio independensi, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio harmoni, rasio pertumbuhan, rasio DSCR

Pendahuluan

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan.

Menurut Halim (2013) analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, rasio aktivitas dan rasio DSCR.

Keuangan daerah merupakan sumber daya yang dominan dalam menopang kemampuan otonomi daerah. Hampir tidak ada satupun kegiatan pemerintah di daerah yang tidak memerlukan biaya. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan daerah merupakan satu variabel yang penting dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan pemerintahan di daerah pada umumnya.

Sebagai kabupaten, Labuhan Batu memiliki beberapa potensi yang dapat dijadikan sumber penerimaan Pendapatan Daerah, yaitu: (1) PAD yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. (2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi. (3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembanding skema kerja dan pelaksanaannya. Selain

itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya.

Berikut adalah gambaran perkembangan APBD Kabupaten Labuhan Batu selama tiga tahun anggaran:

Tabel.1 Struktur APBD Kabupaten Labuhan Batu

STRUKTUR APBD	2011	2012	2013
Pendapatan	670.125.418.854,56	764.412.735.150,70	827.442.717.848,34
PAD	50.958.558.912,56	59.439.168.712,70	49.784.550.240,34
Pendapatan Dana	614.084.984.617,00	667.502.783.638,00	716.233.421.608,00
Perimbangan			
Lain – lain pendapatan	5.081.875.325,00	37.470.782.800,00	61.424.746.000,00
Belanja	632.347.460.841,93	760.581.998.796,22	827.146.775.327,25
Belanja aparatur/tidak langsung	378.837.005.656,93	421.433.618.437,22	455.716.917.403,24
Belanja publik/langsung	253.510.455.185,00	339.148.380.323,00	371.429.857.924,00
Surplus/deficit	37.777.958.012,63	3.830.736.354,48	295.942.521,09
Penerimaan pembiayaan daerah	2.772.992.260,33	37.315.710.056,40	40.066.806.194,33
SILPA	2.772.992.260,33	37.315.710.056,40	40.066.806.194,33
Pengeluaran daerah	3.235.240.216,56	1.079.640.216,55	1.789.640.216,55
Penyertaan modal Pemda	2.145.600.000,00	0,00	500.000.000,00
Pembayaran pokok hutang	89.640.216,56	89.640.216,56	89.640.216,56
Pemberian pinjaman daerah	1.000.000.000,00	990.000.000,00	1.200.000.000,00
Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berkenaan	0,00	40.066.806.194,33	38.573.108.498,87

Dari gambaran struktur APBD diatas, pada sisi pendapatan menunjukkan bahwa dana perimbangan masih lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Dan pada sisi belanja, kebutuhan belanja aparatur terus meningkat dibandingkan dengan belanja publik yang merupakan pelayanan terhadap masyarakat daerah.

Menurut Halim (2008) mengemukakan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Semakin tingginya dana perimbangan yang diterima oleh daerah maka tingkat ketergantungan daerah tersebut sangat tinggi kepada pemerintah pusat. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan amanat otonomi daerah yang menunjukkan kemandirian daerah dan kewenangan luas dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah serta menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dikategorikan kurang baik karena belum mampu mengoptimalkan atau menggali sumber-sumber PAD.

Kajian Pustaka

1. Kinerja

Menurut Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pengertian Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang pegawai diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun pendapat para ahli mengenai pengertian kinerja, sebagai berikut :

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2009) mengemukakan bahwa:

”Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”

2. Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Halim (2012) kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan

laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Adanya tuntutan pertanggungjawaban kinerja keuangan oleh masyarakat mengharuskan pemerintah daerah otonom untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerjanya. Penilaian kinerja tersebut harus dapat memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol kinerja keuangan daerah tersebut. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran ialah suatu proses atau sistem yang digunakan untuk menentukan nilai kuantitatif sesuatu benda/objek, perkara, atau keadaan. Nilai kuantitatif ini biasanya dinyatakan dalam suatu unit angka yang tetap dengan menggunakan alat pengukuran yang berkaitan.

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran dan tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi suatu organisasi, sedangkan pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun proses. Maksudnya bahwa setiap kegiatan organisasi merupakan suatu proses yang tercatat dalam misi dan sejalan dengan tujuan organisasi, dimana kegiatan tersebut dikatakan sukses apabila hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

4. Tujuan Pengukuran Kinerja

Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan.

Secara umum, tujuan pengukuran kinerja adalah:

- a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik
- b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara tertimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strateginya.

- c. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Pada dasarnya pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu:

- a. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah
- b. Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan
- c. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

5. Manfaat Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja mempunyai manfaat yang banyak bagi organisasi, secara umum manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan menilai kinerja manajemen.
- b. Menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan
- c. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya.
- d. Membantu mengungkap dan memecahkan masalah yang ada
- e. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
- f. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

6. Analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Alat rasio keuangan yang digunakan adalah analisis rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (Halim, 2012) yaitu :

- a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian diukur dengan:

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{bantuan pusat} + \text{pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel. 2 Tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (0%)
Rendah sekali	0%-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327/1996

b. Rasio efektifitas dan efisiensi pendapatan asli daerah

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Rasio efektifitas dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{rasio efektifitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan PAD}}{\text{target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel. 3 Kriteria Efektifitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektifitas	Persentase Efektifitas (0%)
Sangat efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup efektif	90% - 99%
Kurang efektif	75% - 89%
Tidak efektif	<75%

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327/1996

c. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk

merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen.

Rasio efisiensi dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{rasioefisiensi} = \frac{\text{by.yangdikeluarkanutmempungutPAD}}{\text{realisasipenerimaanPAD}} \times 100\%$$

Tabel. 4 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi (0%)
Tidak Efisiensi	>30%
Kurang Efisiensi	21% - 30%
Cukup efisiensi	11% - 20%
Efisiensi	5% - 10%
Sangat Efisiensi	<5%

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327/1996

d. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat di formulasikan sebagai berikut:

- 1) Rasio Belanja Rutin terhadap APBD

$$RBR = \frac{\text{belanjarutin/operasi}}{\text{totalAPBD}} \times 100\%$$

- 2) Rasio Belanja Modal terhadap APBD

$$RBM = \frac{\text{belanjamodal}}{\text{totalAPBD}} \times 100$$

e. *Rasio Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*

Rasio DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagiab daerah lainnya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya, pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Rasio DSCR dikatakan baik apabila rasio tercapai lebih dari 2,5 atau 250%.

$$DSCR = \frac{(\text{PAD} + \text{BagianDaerah} + \text{DAU}) - \text{Belanjawajib}}{\text{total (pokokangsuran} + \text{bunga} + \text{biayapinjaman})}$$

f. *Rasio Pertumbuhan*

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

$$RP = \frac{\text{PADt1} - \text{PADt0}}{\text{PADt0}} \times 100\%$$

Keterangan:

PADt1 - PADt0 = Realisasi tahun yang dikurangi tahun sebelumnya.

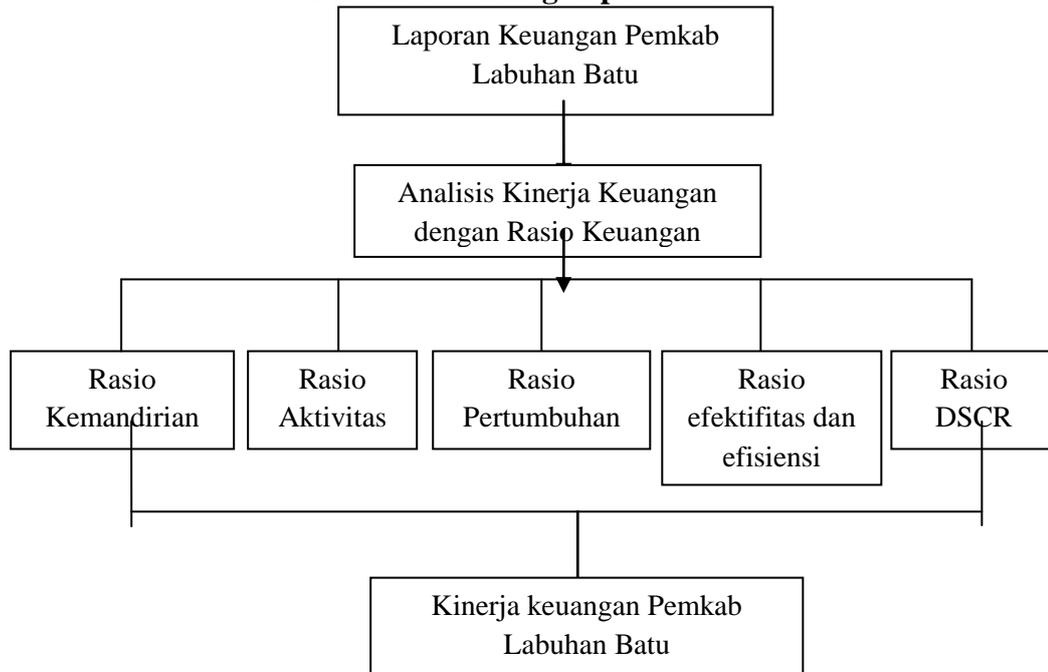
PADt0 = Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya.

Kerangka Berpikir

Laporan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan kemudahan serta kelancaran dalam pengelolaan keuangan daerah nantinya. Ini dikarenakan keuangan daerah menjadi mobilisator terhadap sumber-sumber daya lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan tugas pembangunan daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio keuangan yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, rasio aktivitas dan rasio DSCR. Dengan melihat hasil analisis tersebut dapat diketahui bagaimana hasil kinerja keuangan di Kabupaten Labuhan Batu. Kerangka berfikir dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Gambar.1 Kerangka pemikiran



Metode Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Dalam hal ini, penulis mencoba mengumpulkan data dan mengkaji fakta-fakta yang terkait kemudian menguraikan dan menjelaskan masalah kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Labuhan Batu.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah.

1. Variabel rasio keuangan.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang di capai dari suatu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecederungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki pemda tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya sama untuk melihat bagaimana posisi keuangan pemda tersebut terhadap pemda

lainnya. Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD yaitu:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah merupakan perbandingan antara ketergantungan pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain.

b. Rasio Efektivitas dan Efisiensi.

Rasio Efektivitas merupakan perbandingan antara penerimaan pendapatan asli daerah dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio Efisiensi merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi penerimaan asli daerah.

c. Rasio Aktivitas.

Rasio belanja rutin terhadap APBD, merupakan perbandingan antara total belanja rutin dengan total APBD. Rasio belanja pembangunan terhadap APBD, merupakan perbandingan antara total belanja pembangunan dengan total APBD.

d. Rasio DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*).

Rasio DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*) merupakan perbandingan antara pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya, pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

e. Rasio Pertumbuhan.

Rasio Pertumbuhan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

2. Variabel kinerja keuangan daerah

Kinerja keuangan daerah merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

Teknik Analisa Data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kuantitatif, yaitu data atau informasi berbentuk angka-angka yang kemudian ditarik kesimpulan dengan jelas membandingkan satu dengan yang lain dengan perhitungan yang bersifat kuantitatif.

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan lintas waktu (*time series*) pada:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

b. Rasio Aktifitas (RA)

1) Rasio Belanja Rutin terhadap APBD

$$RBR = \frac{\text{belanjarutin/operasi}}{\text{totalAPBD}} \times 100\%$$

2) Rasio Belanja Modal terhadap APBD

$$RBM = \frac{\text{belanjamodal}}{\text{totalAPBD}} \times 100\%$$

c. Rasio Pertumbuhan (RP)

$$RP = \frac{PADt1 - PADt0}{PADt0} \times 100\%$$

Keterangan :

$PADt1 - PADt0$ = Realisasi tahun yang dihitung dikurangi tahun sebelumnya.

$PADt0$ = Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya.

2. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan lintas seksi/Industri (*cross section*) adalah :

a. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

1) Rasio Efektivitas (RE)

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

2) Rasio Efisiensi (RE)

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Debt Service Coverage Ratio (RDSCR)

$$DSCR = \frac{(PAD + \text{Bagian Daerah} + DAU) - \text{Belanja Wajib}}{\text{Total (Pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman)}}$$

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kabupaten Labuhan Batu adalah salah satu Kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Utara, ibu kota Kabupaten ini terletak di Rantau Prapat. Labuhan Batu terkenal dengan hasil perkebunan sawit dan karet. Pada mulanya luas Kabupaten ini adalah 9.223,18km² sedangkan jumlahnya sebanyak 1.431.605 jiwa pada tahun 2007. Dengan dibentuknya Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Labuhan Batu Utara maka luas Kabupaten ini menjadi 2.562,01km² dan penduduknya sebanyak 857.692 jiwa pada tahun 2008. Kabupaten Labuhan Batu memiliki 9 kecamatan.

Untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta. Beberapa rasio dapat diteliti berdasarkan data keuangan yaitu: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio aktivitas/keserasian, rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah, rasio efektivitas dan efisien keuangan daerah, rasio pinjaman (DSCR).

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan pada tabel dibawah ini dapat dilihat rasio tingkat kemandirian keuangan Pemkab Labuhan Batu sebagai berikut:

Tabel. 5 Perhitungan Rasio Kemandirian Pemkab Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011 – 2013

Keterangan	Tahun		
	2011	2012	2013
PAD	50.958.558.912,56	59.439.168.712,70	49.784.550.240,34
Pend.pajak daerah	20.663.813.657,00	16.768.837.178,00	28.479.806.865,00
Hasil retribusi daerah	13.419.579.164,00	18.016.506.263,31	5.399.337.859,40

Hasil pengelolaan kekayaan daerah	13.614.864.040,56	11.868.983.850,00	11.001.693.091,00
Lain – lain pendapatan yang disahkan	3.260.302.051,00	12.784.841.421,39	4.903.712.424,94
Dana transfer	460.031.899.456,00	591.320.544.635,00	621.030.278.647,00
Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	46.785.533.114,00	54.179.572.635,00	50.834.309.647,00
DAU	367.737.566.342,00	461.644.282.000,00	520.457.519.000,00
DAK	45.508.800.000,00	75.496.690.000,00	49.738.450.000,00
Pinjaman daerah	1.000.000.000,00	990.000.000,00	1.200.000.000,00
Rasio kemandirian (%)	11,05%	10,04%	8%
Keterangan	Rendah sekali	Rendah sekali	Rendah sekali

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa RKKD setiap tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2011 sampai dengan 2013 kemampuan kemandirian keuangan daerah dikategorikan sangat rendah berdasarkan penilaian tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan Keputusan Menteri dalam Negeri No.690.900.327/1996 sebagai berikut.

Tabel. 6 Penilaian Tingkat Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (0%)
Rendah sekali	0%-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas – tugas

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sosial masih rendah sekali, dengan kata lain bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tidak baik.

Seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan fiskal daerah setiap tahunnya, hal tersebut tentunya harus pula didukung dengan adanya upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah. Kendati terjadi peningkatan kinerja PAD dari tahun 2011 ke tahun 2012 dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2013, namun masih juga tetap diikuti dengan peningkatan perolehan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat setiap tahun.

Penerapan kebijakan otonomi daerah tidak serta merta menjadikan daerah mandiri dan mampu membiayai segala aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi perolehan sumber-sumber pendapatan daerah. Faktanya, bahwa kemandirian daerah akan sangat bergantung dari besarnya potensi sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah.

Menurut Yuliati (2008), salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemkab Labuhan Batu dilihat dari rasio kemandirian tahun 2011-2013 bertentangan dengan teori menurut Yuliati. Dimana rata-rata rasio kemandirian daerah yaitu hanya mencapai 0-25% dari kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah yang dikategorikan rendah sekali disebabkan tingginya ketergantungan terhadap pihak pusat.

Untuk itu perlu adanya usaha pemerintah daerah untuk dapat mengurangi ketergantungan atas sumber dana ekstern melalui pengoptimalan sumber pendapatan yang telah ada maupun dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk dapat mengelola sumber pendapatan lain yang sampai saat ini masih dikuasai pemerintah pusat maupun provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Rasio Aktivitas/keserasian

Berdasarkan pada tabel dibawah ini dapat dilihat rasio tingkat kemandirian keuangan Pemkab Labuhan Batu sebagai berikut:

Tabel. 7 Perhitungan Rasio Aktivitas Pemkab Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011-2013

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Total APBD (Rp)	Rasio Belanja Operasi	Rasio Belanja Modal
2011	542.432.527.369	140.829.956.606	683.262.483.975	79,38%	20,61%
2012	592.338.364.409	215.826.646.980	808.165.011.389	73,29%	26,71%
2013	600.408.739.420	197.526.919.924	797.935.659.344	75,24%	24,75%

Dari tabel diatas rasio aktivitas/keserasian terlihat bahwa pada tahun 2011 sampai dengan 2013 rasio belanja rutin/operasi Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu mengalami fluktuasi sedangkan rasio belanja modal pada tahun 2011 sampai dengan 2013 juga mengalami fluktuasi. Akan tetapi, dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin/operasi dan belanja pembangunan/modal belum optimal karena sebagian besar dana yang dimiliki Pemkab Labuhan Batu masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin/ operasi sehingga rasio belanja modal/pembangunan terhadap APBD masih relatif kecil. Meskipun terdapat banyak sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 pasal 10, namun faktanya pemerintah Kabupaten Labuhan Batu belum memperhatikan pembangunan daerah, walaupun belanja modal/pembangunan naik tetapi relatif kecil.

Menurut Halim (2012) semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemkab Labuhan Batu dilihat dari rasio aktivitas/keserasian tahun 2011-2013 bertentangan dengan teori menurut Halim. Dimana presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin lebih besar dari presentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan prasarana ekonomi masyarakat.

Adapun pengelolaan pengeluaran daerah yang harus dikelola memperhatikan beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan antara lain (Nirzawan 2001):

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas pengeluaran daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan segala

aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat luas). Aspek penting yang harus dipertimbangkan oleh para manajer daerah adalah:

- 1) Aspek legalitas pengeluaran daerah yaitu setiap transaksi pengeluaran yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya.
- 2) Pengelolaan atas pengeluaran daerah yang baik, perlindungan aset fisik dan finansial, mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus.

Prinsip – prinsip akuntabilitas pengeluaran daerah:

- a) Adanya sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengeluaran daerah dilakukan secara konsistensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Pengeluaran daerah yang dilakukan dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- c) Pengeluaran daerah yang dilakukan dapat berorientasi pada pencapaian visi, misi, hasil dan manfaat yang akan diperoleh.

b. *Value of Money*

Pengeluaran daerah harus mendasarkan konsep value of money yaitu:

- 1) Ekonomi, adalah hubungan antara pasar (nilai uang) dan masukan (input). Ekonomi adalah pembelian barang dan jasa pada kualitas yang diinginkan dan pada harga terbaik yang memungkinkan. Pengertian ekonomi sebaiknya mencakup juga pengeluaran daerah yang berhati – hati atau cermat dan penggunaan keuangan daerah yang secara optimal tanpa pemborosan (tepat guna). Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian pada hakikatnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dan ekonomi, karena keduanya menghendaki penghapusan dan penurunan biaya.
- 2) Efisiensi, berhubungan erat dengan konsep efektivitas yaitu rasio yang membandingkan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan dilakukan secara efisiensi apabila suatu target kinerja tertentu dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan biaya yang serendah – rendahnya.

- 3) Efektivitas merupakan kaitan atau hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapainya. Efektivitas dalam pemerintah daerah dapat diartikan penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan didalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula mencapai tujuan dan sasaran seperti apa yang telah direncanakan. Namun demikian, walaupun ada yang dilaksanakan menyimpang dari rencana semula tetapi mempunyai dampak yang menguntungkan pada kelompok penerima sasaran manfaat, maka dapat dikatakan efektif. Semakin besar kontribusi pengeluaran yang dilakukan terhadap nilai pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan dapat dikatakan efektif proses kerja dari unit kerja dimaksud.

3. Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan pada tabel dibawah ini dapat dilihat rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah Pemkab Labuhan Batu sebagai berikut:

Tabel. 8 Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD Pemkab Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011-2013

Keterangan	Tahun		
	2011	2012	2013
PAD	50.958.558.912,56	59.439.168.712,70	49.784.550.240,34
Pend.pajak daerah	20.663.813.657,00	16.768.837.178,00	28.479.806.865,00
Hasil retribusi daerah	13.419.579.164,00	18.016.506.263,31	5.399.337.859,40
Hasil pengelolaan kekayaan daerah	13.614.864.040,56	11.868.983.850,00	11.001.693.091,00
Lain – lain pendapatan yang disahkan	3.260.302.051,00	12.784.841.421,39	4.903.712.424,94
Rasio Pertumbuhan PAD (%)	4,17%	16,64%	-16,24%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio pertumbuhan PAD pada tahun 2011 sebesar 4,17% dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 16,64%. Akan tetapi pada tahun 2013 mengalami trend negatif sebesar 16,24% hal ini dikarenakan hasil retribusi daerah yang merupakan komponen utama dalam PAD mengalami penurunan sangat signifikan pada tahun 2013 yaitu sebesar 12.617.168.403,9 rupiah. Menurut Halim (2004) menyatakan bahwa: “ kinerja

pendapatan dinilai baik bila pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika pertumbuhan negatif, hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Labuhan Batu tidak mampu dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode sebelumnya ke periode ini.

Kurangnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah maka kurang juga kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal. Menurut Mahmudi (2011) semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemkab Labuhan Batu dilihat dari rasio pertumbuhan PAD tahun 2011-2013 bertentangan dengan teori menurut Halim karena kinerja pendapatan asli daerah Pemkab Labuhan memiliki kecenderungan (trend) yang menurun dan bernilai negatif pada tahun 2013.

4. Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan pada tabel dibawah ini dapat dilihat rasio efektivitas keuangan Pemkab Labuhan Batu sebagai berikut:

Tabel. 9 Perhitungan Rasio Efektivitas Pemkab Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011-2013

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio efektivitas (%)
2011	46.308.666.100	50.958.558.912,56	110,04%
2012	59.209.345.650	59.439.168.712,70	100,39%
2013	66.556.542.461	49.784.550.240,34	74,80%

Dari tabel diatas dapat dilihat rasio efektivitas keuangan daerah pada tahun 2011 sampai 2012 dikategorikan sangat efektif walaupun terjadi penurunan di tahun 2012 sebesar 9,65% tetapi masih berada pada tingkat rasio 100 persen berdasarkan kriteria penilaian pengukuran sesuai dengan Keputusan Menteri dalam Negeri No.690.900.327/1996 sebagai berikut.

Tabel. 10 Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektifitas	Persentase Efektifitas (0%)
----------------------	-----------------------------

Sangat efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup efektif	90% - 99%
Kurang efektif	75% - 89%
Tidak efektif	<75%

Hal ini dipengaruhi oleh tercapainya hampir semua target sumber PAD terutama untuk pajak daerah, retribusi daerah dan lain – lain PAD yang disahkan mampu terealisasi melebihi anggaran yang ditetapkan. Akan tetapi pada tahun 2013 efektivitas keuangan daerah mengalami penurunan. Penyebab tidak efektifnya PAD pada tahun 2013 dikarenakan tidak tercapainya realisasi hasil retribusi daerah sehingga mengurangi realisasi PAD.

Retribusi daerah disebutkan dalam obyek retribusi daerah terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Secara keseluruhan pendapatan dari retribusi daerah direncanakan sebesar Rp 19.966.874.076,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 18.016.506.263,31. Dengan demikian realisasinya kurang sebesar Rp 1.950.367.812,69. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan lebih menunjukkan penurunan daripada peningkatan selama tahun 2011-2013. Rasio efektivitas tertinggi selama tahun 2011-2013 yaitu pada tahun 2011 sedangkan terendah pada tahun 2013.

Sedangkan menurut Halim (2012) kemampuan daerah dalam menjalankan dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 1 atau 100%. Namun apabila semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemkab Labuhan Batu dilihat dari rasio efektivitas PAD tahun 2011-2012 sudah sejalan dengan teori menurut Halim karena rasio efektivitas pada periode tersebut mencapai 100% yang dikategorikan efektif. Sedangkan periode 2013 bertentangan dengan teori karena hanya mencapai 74,80% kategori tidak efektif. Berbagai kemungkinan tidak efektifnya Pemkab Labuhan batu dalam merealisasikan target PAD salah satunya masih tingginya beban atau biaya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah dan sumber – sumber PAD yang masih belum jelas kedudukan hukumnya di daerah dan infrastruktur yang masih belum mendukung.

Untuk perlu adanya usaha aparaturnya daerah sebagai penyelenggaraan dan pengatur di daerah dalam menentukan potensi-potensi riil.

Untuk mencapai suatu efektivitas PAD dibutuhkan sebuah ketelitian dalam menentukan atau menggali sumber-sumber PAD secara riil sesuai dengan aturan yang berlaku dan kedisiplinan aparaturnya daerah juga sangat dibutuhkan dalam merealisasikan target PAD yang ditetapkan setiap tahunnya. Jika hal tersebut dilakukan oleh setiap daerah otonom akan memberikan peluang dalam pencapaian target yang secara signifikan.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilaksanakan agar pendapatan daerah dapat ditingkatkan antara lain adalah sebagai berikut (Nirzawan 2001):

a. Intensifikasi

Dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi serta tertib dalam administrasi dan tertib dalam penyeteroran.
- 2) Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah b. sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku.
- 3) Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan kontinyu untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan dilapangan oleh petugas.
- 4) Membentuk tim satuan tugas pada dinas terkait yang bertugas mengawasi pemungutan di lapangan oleh petugas.
- 5) Memberikan insentif (rangsangan) secara khusus kepada aparat pengelola PAD yang dapat melampaui penerimaan dari target yang telah ditetapkan.
- 6) Mengadakan pendekatan persuasif kepada wajib pajak agar memenuhi kewajibannya melalui penyuluhan.
- 7) Melakukan langkah – langkah pengendalian guna menghindari timbulnya penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan maupun penetapan pajak dan kontribusi daerah.

b. Ekstensifikasi

Dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Menyusun program kebijakan dan strategi pengembangan dan menggali obyek pemungutan baru yang potensial dengan lebih memprioritaskan kepada retribusi daerah untuk ditetapkan dan dijabarkan dalam peraturan daerah.
- 2) Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah untuk diajukan perubahan.
- 3) Mengadakan studi banding ke daerah lain guna mendapat informasi terhadap jenis-jenis penerimaan pajak dan retribusi lain yang memungkinkan untuk dikembangkan.

5. Rasio Efisiensi PAD

Berdasarkan pada tabel dibawah ini dapat dilihat rasio efisiensi keuangan Pemkab Labuhan Batu sebagai berikut:

Tabel. 11 Perhitungan Rasio Efektifitas Pemkab Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011-2013

Tahun	Biaya pemungutan PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio efisiensi (%)
2011	1.321.834.417	50.958.558.912,56	2,59%
2012	2.496.806.751	59.439.168.712,70	4,20%
2013	2.439.265.280	49.784.550.240,34	3,66%

Tabel diatas menunjukkan rasio efisiensi mengalami fluktuasi dari 2,59% tahun 2011 menjadi 4,20% tahun 2012 dan mengalami penurunan ditahun 2013 sebesar 3,66%, namun masih dalam kategori sangat efisien berdasarkan kriteria penilaian pengukuran sesuai dengan Keputusan Menteri dalam Negeri No.690.900.327/1996 sebagai berikut.

Tabel. 12 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi (0%)
Tidak Efisiensi	>30%
Kurang Efisiensi	21% - 30%
Cukup efisiensi	11% - 20%
Efisiensi	5% - 10%

Sangat Efisiensi	<5%
------------------	-----

Menurut Halim (2012) kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Hal ini menggambarkan bahwa kinerja Pemkab Labuhan Batu baik karena selama periode 2011 sampai dengan 2013 rasio efisiensi yang dihasilkan sangat efisiensi ini berarti pemerintah daerah telah menghitung dengan cermat biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterima setiap tahunnya.

Efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan PAD perlu dilakukan meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada pendapatan yang diterimanya.

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemkab Labuhan Batu dilihat dari rasio efisiensi PAD tahun 2011-2013 sudah sejalan dengan teori menurut Halim karena rasio efisiensi pada periode tersebut mencapai dibawah 5%. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai efisiensi biaya dalam pemungutan PAD suatu daerah antara lain kesiapan aparatur- aparatur daerah, kondisi geografis wilayah, infrastruktur pendukung di daerah dan sistem atau prosedur yang sederhana.

6. Rasio Pinjaman Daerah (DSCR)

Berdasarkan pada tabel dibawah ini dapat dilihat rasio efisiensi keuangan Pemkab Labuhan Batu sebagai berikut:

**Tabel. 13 Perhitungan DSCR Pemkab Labuhan Batu
Tahun Anggaran 2011-2013**

Keterangan	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)
PAD	50.958.558.912,56	59.439.168.712,70	49.784.550.240,34
Dana bagi hasil pajak	46.361.170.985	53.230.132.841	50.014.579.073
Dana bagi hasil	424.362.129	949.439.794	819.730.574

bukan pajak			
DAU	367.737.566.342	461.644.282.000	520.457.519.000
Jumlah	465.481.658.368	575.263.023.347	621.076.378.887
Belanja pegawai	355.593.016.682	400.073.207.968	431.764.733.422
Angsuran pokok hutang	89.640.216,55	89.640.216,55	89.640.216,55
Belanja bunga	66.721.859,93	56.203.793,27	45.363.863,30
Jumlah	156.362.106,49	145.844.009,82	135.004.079,85
DSCR	702,78%	1.201,21%	1.402,26%

Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat setiap tahun DSCR mengalami peningkatan yang signifikan yaitu pada tahun 2011 sebesar 702,78% pada tahun 2012 sebesar 1.201,21% dan pada tahun 2013 sebesar 1.402,26%. Dari hasil rasio tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah daerah Kabupaten Labuhan Batu mempunyai kemampuan untuk melakukan pinjaman karena rasio yang dicapai lebih dari 250%.

Menurut Halim (2012) ketentuan yang menyangkut persyaratan suatu daerah dapat melakukan pinjaman yaitu memiliki DSCR minimal sebesar 2,5 atau 250%. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemkab Labuhan Batu dilihat dari rasio DSCR tahun 2011-2013 sudah sejalan dengan teori menurut Halim karena pada periode tersebut DSCR Pemkab Labuhan Batu mencapai diatas 250% dan mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahun. DSCR Pemkab Labuhan Batu mengalami peningkatan yang sangat tajam disebabkan ada pengaruh meningkatnya dana alokasi umum sebagai dana perimbangan yang menjadi hak daerah.

Kesimpulan

Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu dalam memenuhi dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat masih relatif rendah sekali berdasarkan kriteria penilaian kemandirian daerah menurut Kepmendagri karena berada pada interval 0-25%. Pada rasio aktivitas tahun 2011-2013 menunjukkan bahwa Pemkab Labuhan Batu masih memprioritaskan anggaran belanjanya untuk belanja rutin dibandingkan belanja pembangunan. Pertumbuhan PAD pada tahun 2011-2013

menunjukkan kinerja Pemkab Labuhan Batu tidak baik. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata pertumbuhan PAD yang bernilai negatif.

Pada rasio efektivitas PAD tahun 2011-2012 menunjukkan kinerja Pemkab Labuhan Batu yang sangat efektif tetapi pada tahun 2013 kinerja Pemkab Labuhan Batu tidak efektif dalam merealisasikan PAD yang direncanakan. Pada rasio efisiensi PAD tahun 2011-2013 menunjukkan bahwa kinerja Pemkab Labuhan Batu sangat efisien karena mampu menekan biaya-biaya yang ditimbulkan dari pemungutan PAD. Secara potensial apabila terjadi kekurangan dana, maka untuk mencukupi kebutuhan belanjanya, Kabupaten Labuhan Batu memiliki kesempatan untuk melakukan pinjaman karena mempunyai DSCR diatas 250% setiap tahun.

Beberapa implikasi yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi Pemkab Labuhan Batu dalam mengambil kebijakan belanja daerah. Karena memiliki ukuran dari kinerja keuangan, sehingga dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusannya.

Daftar Pustaka

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Darise, Nurlan. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit PT Indeks.
- Gde, I Dewa Bisma. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 200-2007*". Jurnal, Universitas Mataram (<http://unmasmataram.ac.id/jurnal/> diakses tanggal 31 Mei 2015).
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Mentari Yosephen (2014). "Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Otonomi Daerah Kota Malang". Jurnal, Universitas Brawijaya (<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index,diaksses> pada tanggal 24 Juni 2015).
- Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2005/58tahun2005PP.HTM>, diakses pada tanggal 5 Juni 2015).

Pramono, Joko. 2011. *Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya*. STIE AMA Salatiga (<http://jurnal.stieama.ac.id/index.php/ama/article/view/970>. diakses pada tanggal 25 Maret 2015).

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah (<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2004/32tahun2004UU.HTM>, diakses tanggal 5 Juni 2015).

Yuliandriansyah (2009). "Otonomi Daerah dan Investasi". Artikel Online. (http://yuliandi_ansyah.staff.uui.ac.id/2009/02/02/otonomi-daerah-dan-investasi/, diakses tanggal 31 Mei 2015).